



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FRINTA PRATAMASARI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK : 263242

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 975.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/39 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 81.750.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR NC 110D VARIO JF13E Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ GD3 1.5 VTI MT Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. MOTOR, HONDA HONDA X1H02N35M1 AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 204.658.100

D. SURAT BERTHARGA Rp. 7.335.555

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 33.029.216

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.301.772.871

III. HUTANG Rp. 542.360.802

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 759.412.069

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.